

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

1. Kondisi Inflasi Januari 2025

Pada Januari 2025 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Kalimantan Barat sebesar 0,15 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,57. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kayong Utara sebesar 0,90 persen dengan IHK sebesar 105,95 dan terendah terjadi di Kota Pontianak sebesar 0,02 persen dengan IHK sebesar 105,12. Sementara itu, deflasi y-on-y terjadi di Sintang sebesar 0,12 persen dengan IHK sebesar 104,33. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya delapan indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 3,50 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,39 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,79 persen; kelompok transportasi sebesar 0,38 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,48 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,88 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,11 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,16 persen. Sementara itu, dua kelompok pengeluaran mengalami penurunan indeks yaitu kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga turun sebesar 11,70 persen dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan turun sebesar 0,28 persen. Satu kelompok lainnya tidak mengalami perubahan indeks yaitu kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga. Tingkat deflasi Provinsi Kalimantan Barat month to month (m-to-m) Januari 2025 sebesar 1,17 persen dan tingkat deflasi year to date (y-to-d) Januari 2025 sebesar 1,17 persen.

Indeks Harga Konsumen/Inflasi Menurut Kelompok

Perkembangan harga berbagai komoditas pada Januari 2025 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Provinsi Kalimantan Barat di 5 kabupaten/kota, pada Januari 2025 terjadi inflasi y-on-y sebesar 0,15 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 105,41 pada Januari 2024 menjadi 105,57 pada Januari 2025. Tingkat deflasi m-to-m dan tingkat deflasi y-to-d sebesar 1,17 persen.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya delapan indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 3,50 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,39 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,79 persen; kelompok transportasi sebesar 0,38 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,48 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,88 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,11 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,16 persen. Sementara itu, dua kelompok pengeluaran mengalami penurunan indeks yaitu kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga turun sebesar 11,70 persen dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan turun sebesar 0,28 persen. Satu kelompok lainnya tidak mengalami perubahan indeks yaitu kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga.

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada Januari 2025, antara lain: emas perhiasan, minyak goreng, cabai rawit, kopi bubuk, sigaret kretek mesin, ikan baung, udang basah, telur ayam ras, daging babi, dan ikan tongkol/ikan ambu-ambu. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y, antara lain: tarif listrik, daging ayam ras, ikan bandeng/ikan bolu, bahan bakar rumah tangga, sawi hijau,

tomat, bayam, telepon seluler, kol putih/kubis, dan baju muslim pria.

Sementara komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan deflasi m-to-m pada Januari 2025, antara lain: tarif listrik, bawang merah, angkutan udara, dan sawi hijau. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m, antara lain: cabai rawit, daging ayam ras, udang basah, telur ayam ras, ikan kembung, minyak goreng, kentang, cabai merah, ikan tongkol/ikan ambu-ambu, dan jeruk.

Pada Januari 2025, delapan kelompok pengeluaran memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,24 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,06 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,02 persen; kelompok transportasi sebesar 0,04 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,01 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,11persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,10 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,21 persen. Dua kelompok pengeluaran memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y yaitu kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,63 persen dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,01 persen. Sementara itu, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga tidak memberikan andil/sumbangan terhadap inflasi/deflasi y-on-y.

Perbandingan Inflasi Antar Tahun

Pada Januari 2025, tingkat inflasi y-on-y Provinsi Kalimantan Barat sebesar 0,15 persen dan tingkat deflasi y-to-d Provinsi Kalimantan Barat sebesar 1,17 persen.

Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Antarwilayah Cakupan IHK

Pada Januari 2025, empat dari lima kota IHK di Provinsi Kalimantan Barat mengalami inflasi y-on-y. Inflasi y-on-y tertinggi terjadi di Kabupaten Kayong Utara sebesar 0,90 persen dengan IHK sebesar 105,95 dan terendah terjadi di Kota Pontianak sebesar 0,02 persen dengan IHK sebesar 105,12. Sementara itu, deflasi y-on-y hanya terjadi di Sintang sebesar 0,12 persen dengan IHK sebesar 104,33.

2. Kondisi Inflasi Februari 2025

Pada Februari 2025 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Kalimantan Barat sebesar 0,04 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,53. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kayong Utara sebesar 0,57 persen dengan IHK sebesar 105,98 dan terendah terjadi di Kabupaten Ketapang sebesar 0,35 persen dengan IHK sebesar 106,82. Sementara itu, deflasi y-on-y terjadi di Sintang sebesar 0,37 persen dengan IHK sebesar 104,32. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sembilan indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 3,84 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,54 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,08 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,97 persen; kelompok transportasi sebesar 2,57 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,43 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,39 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,12 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,70 persen. Sementara itu, dua kelompok pengeluaran mengalami penurunan indeks yaitu kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga turun sebesar 15,53 persen dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan

turun sebesar 0,29 persen. Tingkat deflasi Provinsi Kalimantan Barat month to month (m-to-m) Februari 2025 sebesar 0,04 persen dan tingkat deflasi year to date (y-to-d) Februari 2025 sebesar 1,21 persen.

Indeks Harga Konsumen/Inflasi Menurut Kelompok

Perkembangan harga berbagai komoditas pada Februari 2025 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Provinsi Kalimantan Barat di 5 kabupaten/kota, pada Februari 2025 terjadi inflasi y-on-y sebesar 0,04 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 105,49 pada Februari 2024 menjadi 105,53 pada Februari 2025. Tingkat deflasi m-to-m sebesar 0,04 persen dan tingkat deflasi y-to-d sebesar 1,21 persen.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sembilan indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 3,84 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,54 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,08 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,97 persen; kelompok transportasi sebesar 2,57 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,43 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,39 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,12 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,70 persen. Sementara itu, dua kelompok pengeluaran mengalami penurunan indeks yaitu kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga turun sebesar 15,53 persen dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan turun sebesar 0,29 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada Februari 2025, antara lain: angkutan udara, emas perhiasan, minyak goreng, cabai rawit, kopi bubuk, udang basah, ikan baung, kangkung, sigaret kretek mesin (SKM), dan wortel. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y, antara lain: tarif listrik, tomat, beras, daging ayam ras, ketimun, tenggiri, telepon seluler, baju muslim pria, sabun cair/cuci piring, dan ikan teri.

Sementara komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan deflasi m-to-m pada Februari 2025, antara lain: tarif listrik, daging ayam ras, bawang merah, telur ayam ras, sawi hijau, ikan tongkol/ikan ambu-ambu, dan tomat. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m, antara lain: angkutan udara, cabai rawit, udang basah, wortel, kangkung, bayam, cabai merah, emas perhiasan, ikan nila, dan minyak goreng. Pada Februari 2025, sembilan kelompok pengeluaran memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,39 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,07 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,02 persen; kelompok transportasi sebesar 0,30 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,01 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,09 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,10 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,24 persen.

Sementara itu, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga memberi andil yang relatif sangat kecil. Di sisi lain terdapat dua kelompok pengeluaran memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y yaitu kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,16 persen dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,02 persen.

Perbandingan Inflasi Antar Tahun

Pada Februari 2025, tingkat inflasi y-on-y Provinsi Kalimantan Barat sebesar 0,04 persen dan tingkat deflasi y-to-d Provinsi Kalimantan Barat sebesar 0,04 persen.

Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Antarwilayah Cakupan IHK

Pada Februari 2025, dua dari lima kota IHK di Provinsi Kalimantan Barat mengalami inflasi y-on-y yaitu Kabupaten Kayong Utara sebesar 0,57 persen dengan IHK sebesar 105,98 dan Kabupaten Ketapang sebesar 0,35 persen dengan IHK sebesar 106,82. Sementara itu, tiga lainnya mengalami deflasi y-on-y. Deflasi terdalam terjadi di Sintang sebesar 0,37 persen dengan IHK sebesar 104,32

3. Kondisi Inflasi Maret 2025

Pada Maret 2025 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Kalimantan Barat sebesar 0,94 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,83. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Ketapang sebesar 1,74 persen dengan IHK sebesar 108,62 dan terendah terjadi di Kota Pontianak sebesar 0,38 persen dengan IHK sebesar 105,84. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sembilan indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,98 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,55 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,35 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,24 persen; kelompok transportasi sebesar 0,90 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,70 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,39 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,95 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,79 persen. Sementara itu, dua kelompok pengeluaran mengalami penurunan indeks yaitu kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga turun sebesar 5,72 persen dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan turun sebesar 0,56 persen. Tingkat inflasi Provinsi Kalimantan Barat month to month (m-to-m) Maret 2025 sebesar 1,23 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) Maret 2025 sebesar 0,01 persen.

Indeks Harga Konsumen/Inflasi Menurut Kelompok

Perkembangan harga berbagai komoditas pada September 2024 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS di 150 kabupaten/kota, pada September 2024 terjadi inflasi y-on-y sebesar 1,84 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 104,02 pada September 2023 menjadi 105,93 pada September 2024. Tingkat deflasi m-to-m sebesar 0,12 persen dan tingkat inflasi y-to-d sebesar 0,74 persen.

Perkembangan harga berbagai komoditas pada Maret 2025 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Provinsi Kalimantan Barat di 5 kabupaten/kota, pada Maret 2025 terjadi inflasi y-on-y sebesar 0,94 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 105,84 pada Maret 2024 menjadi 106,83 pada Maret 2025. Tingkat inflasi m-to-m sebesar 1,23 persen dan tingkat inflasi y-to-d sebesar 0,01 persen.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sembilan indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,98 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,55 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,35 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,24 persen; kelompok transportasi sebesar 0,90 persen; kelompok rekreasi, olahraga,

dan budaya sebesar 1,70 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,39 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,95 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,79 persen.

Sementara itu, dua kelompok pengeluaran mengalami penurunan indeks yaitu kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga turun sebesar 5,72 persen dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan turun sebesar 0,56 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada Maret 2025, antara lain: emas perhiasan, cabai rawit, minyak goreng, udang basah, ikan baung, kopi bubuk, ikan kembung, sigaret kretek mesin (SKM), cabai merah, dan kangkung. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y, antara lain: tarif listrik, beras, daging ayam ras, telur ayam ras, tomat, ikan tenggiri, telepon seluler, sawi hijau, ikan tongkol/ikan ambu-ambu, dan popok bayi sekali pakai/diapers.

Sementara komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m pada Maret 2025, antara lain: tarif listrik, cabai rawit, cabai merah, emas perhiasan, udang basah, mobil, ikan nila, telur ayam ras, semangka, dan ikan kembung. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi m-to-m, antara lain: angkutan udara, daging ayam ras, ketimun, kangkung, wortel, ikan tongkol/ikan ambu-ambu, sawi hijau, dan bayam. Pada Maret 2025, sembilan kelompok pengeluaran memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,09 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,07 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,02 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,03 persen; kelompok transportasi sebesar 0,10 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,03 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,09 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,08 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,25 persen. Di sisi lain terdapat dua kelompok pengeluaran memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y yaitu kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,79 persen dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,03 persen.

Perbandingan Inflasi Antar Tahun

Pada Maret 2025, tingkat inflasi y-on-y Provinsi Kalimantan Barat sebesar 0,94 persen dan tingkat inflasi y-to-d Provinsi Kalimantan Barat sebesar 0,01 persen. Sementara itu, pada Maret 2024 tingkat inflasi y-on-y sebesar 2,51 persen dan inflasi y-to-d sebesar 0,78 persen.

Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Antarwilayah Cakupan IHK

Pada Maret 2025, seluruh kota IHK di Provinsi Kalimantan Barat mengalami inflasi y-on-y. inflasi y-on-y tertinggi terjadi di Kabupaten Ketapang sebesar 1,74 persen dengan IHK sebesar 108,62, sedangkan inflasi y-on-y terendah terjadi di Kota Pontianak sebesar 0,38 persen dengan IHK sebesar 105,84.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Pada bulan Februari 2025, Kalimantan Barat mencatatkan deflasi m-to-m sebesar 0,04 persen. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan bulan sebelumnya. Deflasi bulanan yang masih terjadi pada bulan Februari masih dipengaruhi oleh pemberlakuan kebijakan pemerintah yang memberikan potongan biaya listrik bagi pelanggan rumah tangga dengan

daya 450 VA, 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA yang berlaku selama dua bulan yaitu Januari dan Februari 2025. Kebijakan ini memberikan dampak yang cukup besar, mengingat listrik merupakan salah satu komponen penting dalam pengeluaran rumah tangga.

Namun, meskipun Kalimantan Barat mengalami deflasi secara bulanan, jika melihat data secara tahunan (y-on-y), Kalimantan Barat mengalami inflasi sebesar 0,04%. Inflasi tahunan ini terutama dipengaruhi oleh lonjakan harga beberapa komoditas penting seperti cabai rawit dan cabai merah. Selain itu, inflasi tahunan juga dipengaruhi oleh kenaikan tarif angkutan udara dan emas perhiasan. Kenaikan harga tiket pesawat disebabkan oleh arus mudik pada perayaan Imlek dan Cap Go Meh mendorong meningkatnya harga tiket pesawat.

Jika dilihat secara historis, Kalimantan Barat dominan mengalami inflasi pada bulan Maret dengan komoditas yang sering muncul sebagai pendorong inflasi adalah cabai rawit, cabai merah, dan bawang putih. Bulan Maret 2025 juga bertepatan dengan bulan Ramadhan, dimana permintaan terhadap sejumlah bahan pokok biasanya meningkat. Untuk itu, perhatian terhadap komoditas-komoditas seperti cabai rawit, cabai merah, bawang putih, beberapa bahan kebutuhan lainnya yang dominan menjadi penyumbang inflasi di bulan Februari menjadi sangat penting agar tidak terjadi lonjakan harga yang dapat memberatkan masyarakat. Pemerintah perlu memantau dan mengantisipasi potensi fluktuasi harga yang biasanya terjadi pada periode tersebut. Kebijakan-kebijakan seperti pengaturan distribusi, stabilisasi harga, serta subsidi bagi komoditas tertentu dapat menjadi langkah yang efektif untuk menjaga daya beli masyarakat dan mencegah inflasi yang lebih tinggi.

Pada bulan Januari 2025, Kalimantan mencatatkan deflasi m-to-m yang cukup signifikan, yaitu sebesar 1,17 persen. Deflasi ini terjadi karena adanya kebijakan pemerintah yang memberikan potongan biaya listrik bagi pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA, 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA yang berlaku selama dua bulan yaitu Januari dan Februari 2025, yang kemudian menurunkan beban pengeluaran masyarakat, serta mengurangi tekanan terhadap harga barang dan jasa. Kebijakan ini memberikan dampak yang cukup besar, mengingat listrik merupakan salah satu komponen penting dalam pengeluaran rumah tangga. Namun, meskipun Kalimantan mengalami deflasi secara bulanan, jika melihat data secara tahunan (y-on-y), inflasi tercatat masih ada, meskipun terbilang kecil, yakni hanya 0,15%. Inflasi tahunan ini terutama dipengaruhi oleh lonjakan harga beberapa komoditas penting, seperti minyak goreng, cabai rawit, yang memang menjadi penggerak utama dalam pola pergerakan harga di pasar.

Jika dilihat secara historis, Kalimantan Barat dominan mengalami inflasi pada bulan Februari dengan komoditas yang sering muncul sebagai pendorong inflasi adalah udang basah, ikan kembung, cabai rawit, dan beras. Bulan Februari 2025 juga bertepatan dengan persiapan menjelang bulan Ramadhan yang tahun ini berlangsung di bulan Maret, dimana permintaan terhadap sejumlah bahan pokok biasanya meningkat. Untuk itu, perhatian terhadap komoditas-komoditas seperti minyak goreng, cabai rawit, beras, dan beberapa bahan kebutuhan lainnya yang dominan menjadi penyumbang inflasi di bulan Februari menjadi sangat penting agar tidak terjadi lonjakan harga yang dapat memberatkan masyarakat. Pemerintah perlu memantau dan mengantisipasi potensi fluktuasi harga yang biasanya terjadi pada periode tersebut. Kebijakan-kebijakan seperti pengaturan distribusi, stabilisasi harga, serta subsidi bagi komoditas tertentu dapat menjadi langkah yang efektif untuk menjaga daya beli masyarakat dan mencegah inflasi yang lebih tinggi, terutama menjelang bulan puasa.

Pada Desember 2024, Kalimantan Barat mengalami inflasi m-to-m sebesar 0,46 persen.

Dengan mengalami kenaikan indeks harga barang/jasa secara umum, tingkat inflasi tahunan di Desember 2024 mencapai 1,71 persen. Jika diukur dari target inflasi yang ditetapkan pemerintah sebesar $2,5 \% \pm 1\%$, angka inflasi tahunan Kalimantan Barat cukup terkendali. Terpantau hingga akhir tahun 2024 komoditas yang cukup dominan mendorong inflasi berasal dari kelompok makanan, minuman dan tembakau. Komoditas tersebut antara lain minyak goreng, bawang merah, sigaret kretek mesin (SKM), kopi bubuk, cumi-cumi, ikan tongkol, bawang putih, dan telur ayam ras. Namun penting untuk dicatat bahwa komoditas non makanan justru mendominasi pergerakan inflasi dengan memberi andil inflasi terbesar 0,15% yaitu emas perhiasan. Secara historis, Kalimantan Barat dominan mengalami inflasi pada Januari dengan komoditas yang sering muncul sebagai pendorong inflasi adalah telur ayam ras, cumi-cumi, ikan kembung, tomat, bawang merah, cabai rawit, dan minyak goreng.

Sedangkan, komoditas yang dominan memberikan andil terhadap deflasi pada bulan Januari diantaranya angkutan udara, ikan tongkol, daging ayam ras, bensin, daging babi, dan wortel. Meskipun pencapaian 2024 patut diapresiasi, tantangan untuk menjaga stabilitas harga tetap menanti di tahun 2025. Beberapa faktor utama yang berpotensi mempengaruhi kondisi harga mencakup ketidakpastian ekonomi global, cuaca ekstrim, dinamika geopolitik, dan kenaikan PPN 12% yang akan mulai diberlakukan di tahun 2025. Jika melihat secara historis, inflasi Januari disumbang oleh kelompok bahan pangan. Ketidakpastian di pasar komoditas global, termasuk fluktuasi harga komoditas seperti energi dan bahan pangan dapat memberikan dampak terhadap struktur biaya produksi dan distribusi barang. Selain itu, cuaca ekstrem yang diprediksi BMKG akan berlangsung pada triwulan pertama di tahun 2025 bisa menjadi ancaman bagi hasil panen lokal. Ketergantungan masyarakat pada hasil pertanian membuat fluktuasi produksi akibat gagal panen langsung mempengaruhi harga pangan. Pemerintah daerah memerlukan upaya antisipasi untuk menghindari lonjakan harga beberapa komoditas pangan yang berpotensi mengalami kenaikan harga di awal tahun 2025.

Secara tahunan, inflasi gabungan 5 kab/kota IHK of Kalimantan Barat pada bulan Januari 2025 tercatat sebesar 0,15% (yoy), lebih rendah dari inflasi bulan sebelumnya yang sebesar 1,71% (yoy). Inflasi tersebut disumbang oleh empat kabupaten/kota IHK yaitu Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kab. Katapang, dan Kab. Kayong Utara dengan inflasi tahunan masing-masing sebesar 0,02% (yoy), 0,29% (yoy), 0,27% (yoy), dan 0,90% (yoy), sedangkan Kab. Sintang mengalami deflasi 0,12% (yoy).

Secara tahun berjalan atau year-to-date (ytd) dan bulanan (mtm), IHK Kalimantan Barat pada bulan Januari 2025 tercatat deflasi 1,179% (ytd), berbalik arah dari bulan sebelumnya yang inflasi 1,71% (ytd). Adapun secara spasial, seluruh kabupaten/kota IHK tahun berjalan mengalami deflasi dengan Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kab. Sintang, Kab. Ketapang, dan Kab. Kayong Utara masing-masing deflasi 1,58% (ytd), 1,57% (ytd), 1,98% (ytd), 1,88% (ytd), dan 2,21% (ytd).

Secara historis, realisasi deflasi 1,17% (mtm) di Kalimantan Barat lebih rendah dan berbeda arah dibandingkan rerata historis perkembangan inflasi barang dan jasa pada bulan Januari selama tiga tahun terakhir yang tercatat inflasi 0,52% (mtm). Realisasi deflasi pada bulan terutama didorong oleh kelompok (1) perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga serta (2) transportasi dengan andil deflasi bulanan masing-masing sebesar 1,62% dan 0,03%. Berdasarkan komoditas, deflasi pada kelompok ini terutama didorong oleh komoditas tarif listrik, bawang merah, dan angkutan udara.

Jika dibandingkan dengan provinsi lain of Kalimantan, Kalimantan Barat mengalami deflasi

bulanan terdalam kedua, lebih dangkaldari Kalimantan Utara yang deflasi 0,12% (mtm).

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah (GPM) dalam rangka stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

Nomor Antrian

Masyarakat yang datang berpartisipasi dalam Gerakan Pangan Murah (GPM) diarahkan untuk mengambil nomer antrian terlebih dahulu untuk kemudian dipanggil berdasarkan nomor urut agar lebih tertib, merata dan terorganisir.

Sistem Penjualan

Agar dapat menjangkau jumlah pembeli secara lebih luas, jumlah pembelian dibatasi per orang per antrian. Selain itu pembeli juga diwajibkan membawakan fotocopy Kartu Tanda Penduduk. Terkait kebijakan tersebut masyarakat juga diharapkan dapat mendukung Langkah-langkah pemerintah dalam pengendalian inflasi. Salah satu caranya dengan cara bijak dalam berbelanja, belanjalah sesuai kebutuhan, jangan belanja berlebihan yang mendorong terjadinya peningkatan permintaan di pasar sehingga mendorong kenaikan harga barang-barang. Perilaku masyarakat dalam berbelanja akan mempengaruhi secara psikologis bagi stabilitas harga pasar.

Keamanan

Untuk pengamanan Gerakan Pangan Murah (GPM) melibatkan pengamanan personal Kepolisian/Kamtibmasy untuk membe rikan pelayanan keamanan, ketertiban, ketentraman serta perlindungan padasaat Gelar Pangan Murah (GPM)

Kerjasama dengan PT. Topino Niaga Nusantara dalam menyediakan bahan pangan yang dibazarkan. Adapun Bahan pangan yang dibazarkan adalah:

1. Beras Premium
2. Minyak Goreng Premium
3. Gula Premium

Dalam Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah di beberapa lokasi turut serta didampingi vendor pendamping guna ikut memeriahkan Gerakan Murah seperti Mayora, Indofood, Primafood, Kios Unggas, Inaco, CV. Cahaya Abadi (Regal) dan lain-lain.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Kalimantan Barat mencatatkan pencapaian positif dalam pengendalian inflasi sepanjang tahun 2024. Dengan tingkat inflasi yang terkendali di rentang target nasional $2,5\% \pm 1\%$, Kalimantan Barat berhasil menunjukkan kinerja yang solid di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Hingga Desember 2024, inflasi *year-on-year* (*y-on-y*) tercatat sebesar 1,71%, sementara inflasi *month-to-month* (*m-t-m*) mencapai 0,46%.

Meskipun pencapaian 2024 patut diapresiasi, tantangan untuk menjaga stabilitas harga tetap menanti di tahun 2025. Beberapa faktor utama yang berpotensi mempengaruhi kondisi harga mencakup ketidakpastian ekonomi global, cuaca ekstrim, dinamika geopolitik, dan kenaikan PPN 12% yang akan mulai diberlakukan di tahun 2025. Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis yang terkoordinasi dan berkelanjutan, diantaranya:

1. **Pengelolaan Cadangan Pangan dan Penguatan Ketahanan Pangan Lokal:** Pengaturan stok dapat dilakukan dengan pengembangan fasilitas penyimpanan yang memadai, misalnya dengan penguatan cold storage untuk menyimpan daging ayam ras maupun produk hasil pertanian seperti sayuran. Penyimpanan ini dapat membantu mengurangi tekanan untuk menjual barang dengan harga rendah ketika terjadi over supply.
2. **Efisiensi Distribusi dan Logistik:** Infrastruktur distribusi yang efisien dapat mengurangi biaya transportasi dan menjaga harga stabil. Pemerintah dapat memfasilitasi konektivitas wilayah produksi dengan pasar konsumen agar rantai pasokan lebih lancar dan mengurangi risiko deflasi akibat over supply di daerah tertentu.
3. **Penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi:** Memastikan kelancaran pasokan dapat dilakukan melalui penyediaan data terkait produksi, distribusi, dan konsumsi secara up to date dan terintegrasi. Data ini bisa membantu mengidentifikasi wilayah dengan potensi over-supply atau kekurangan pasokan. Dengan begitu, distribusi barang dapat diarahkan ke wilayah yang membutuhkannya, menghindari harga yang jatuh akibat penumpukan di satu daerah.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Beberapa rekomendasi pengendalian inflasi ke depan sejalan dengan potensi risiko terhadap stabilitas harga dan ketahanan pangan daerah, antara lain:

1. Pembentukan roadmap pengendalian inflasi 2025-2027 dengan mempertimbangkan identifikasi komoditas inflasi utama (kontributor inflasi utama), mapping progja OPD dari hulu-hilir, serta sinkronisasi dengan program pemerintah pusat untuk mendukung salah satu program Asta Cita dalam upaya menjaga ketahanan serta mendukung program di tingkat provinsi (al. Oplah, cetak sawah, dan Makan Bergizi Gratis);
2. Mendorong adopsi teknologi pertanian serta digital farming dari sisi hulu sampai hilir untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian, serta mendorong implementasi closed loop system berbasis digital dan terintegrasi dengan dukungan semua pihak hingga pemasaran yang sudah terjamin melalui kemitraan ataupun agregator. Pemanfaatan BUMDes sebagai alternatif supplier bahan baku pangan dan dapur umum MBG sehingga dapat menekan biaya logistik dan memperluas lapangan kerja;
3. Memperkuat data dan neraca pangan Kalimantan Barat sebagai acuan mengoordinir distributor, pelaku usaha, dan optimalisasi BUMD Pangan untuk menyerap produksi pertanian di daerah dengan fasilitasi penyediaan gudang penyimpanan pangan atau *cold storage*, serta mengutamakan perdagangan intra provinsi guna memenuhi kebutuhan antar daerah dan mendukung KAD pangan. Untuk selanjutnya mendorong KAD dari daerah sentra produksi dan penyangga sentra produksi ke daerah defisit dalam area provinsi untuk komoditas pangan lokal baik Government to Government, Government to Business, dan Business to Business;
4. Menyusun program inovatif dan pemberian insentif bidang pertanian, al. insentif kredit

sektor pertanian, subsidi pupuk, program pendorong minat generasi milenial atau petani muda dalam sektor pertanian, dan mapping keunggulan komoditas desa/kecamatan. Mendorong akses pembiayaan formal, antara lain KUR dan pemanfaatan arah Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial perbankan terutama sektor hortikultura, perikanan, peternakan, dan tanaman pangan;

5. Berkoordinasi dengan mitra kerja strategis terkait intensifikasi pembangunan infrastruktur perhubungan distribusi antar kabupaten/kota dengan daerah sentra produksi, serta infrastruktur pengairan seperti irigasi dan tanggul pengendali banjir baik melalui APBD dan optimalisasi anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT), ataupun investasi swasta Kalimantan Barat;
6. Implementasi program pasar penyeimbang (Kipas Kapuas) di Kalimantan Barat, utamanya di lokasi pasar utama di kabupaten/kota sampel inflasi, yaitu Pontianak, Singkawang, Sintang, Ketapang, dan Kayong Utara. Setelah *soft launching* pada bulan Desember 2024, selanjutnya *piloting project* diusulkan untuk dimulai dari pasar tradisional Pontianak. Pasar penyeimbang ini merupakan toko permanen yang akan dikelola oleh Perusda atau pihak ketiga lainnya dan berfungsi sebagai media operasi pasar ketika harga komoditas tertentu sedang tinggi, sedangkan dalam kondisi harga terkendali akan berfungsi sebagai toko sembako pada umumnya. Kipas Kapuas juga mengadopsi teknologi digital dalam monitoring dan koordinasi dalam TPID;
7. Memperkuat efektifitas komunikasi antar daerah melalui pelaksanaan High Level Meeting dan Rapat Koordinasi TPID berbasis wilayah (al. pelaksanaan HLM Singbebaswah);
8. Melaksanakan Operasi Pasar (OP)/Gelar Pasar Murah (GPM) untuk menjaga inflasi Kalimantan Barat berada dalam rentang target inflasi $2,5 \pm 1\%$. Berdasarkan pemantauan Early Warning System (EWS), beberapa komoditas yang direkomendasikan untuk dilakukan OP/GPM pada bulan April 2025 antara lain sawi hijau, bawang merah, ikan tongkol, kentang, bayam, daging sapi, ikan kembung, telur ayam ras, serta komoditas kontributor inflasi minyak goreng dan gula pasir.